

# **PENERJEMAHAN BUKU TEMATIK-TERPADU SD/MI KELAS 1: PEMANFAATAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM PENGANTAR PENDIDIKAN KELAS AWAL<sup>1</sup>**

## ***THE TRANSLATION OF SD/MI GRADE: 1 INTEGRATED THEMATIC BOOKS: THE USE OF LOCAL LANGUAGE AND LITERATURE IN THE INTRODUCTION OF PRIMARY EDUCATION***

**Imam Budi Utomo**  
**Kantor Bahasa Kalimantan Timur**  
**Posel: boeditama@yahoo.co.id**

### ***Abstrak***

Makalah ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya nyata dalam rangka revitalisasi bahasa dan sastra daerah di Indonesia melalui jalur pendidikan. Salah satu yang penulis tawarkan adalah menyusun terjemahan atau membuat versi bahasa daerah terhadap buku teks *Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas I*. Dengan adanya buku teks terjemahan (versi bahasa daerah) tersebut guru lebih mudah dalam menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa daerah. Siswa pun (kelas 1 hingga kelas 3) diharapkan dapat menerima materi lebih mudah, sekaligus memupuk kecintaan dan kebanggaan siswa terhadap bahasa dan sastra daerah yang dimilikinya.

**Kata kunci:** bahasa dan sastra daerah, tematik-terpadu, Kurikulum 2013

### ***Abstract***

*This paper aims to reveal the contribution of the revitalization perspective toward local language and literature in education field in Indonesia. The writer tried to arrange the translation or local language version of text-book thematic-integrative based Curriculum 2013 for elementary (class 1). It is expected for the teacher to convey the subject easily in local language. Also, the students (class 1 until 3) are expected to accept the subject easier and to emerge students' pride to their mother tongue and local literature.*

**Keywords:** local language and literature, thematic-integrative, curriculum 2013

\*) Naskah masuk: 5 April 2014. Penyunting: Yudianti Herawati, M.A. Suntingan I: 10 Februari 2015. Suntingan II: 14 Februari 2015

<sup>1</sup> Makalah ini telah dipaparkan dalam Seminar Nasional Bahasa Ibu (SNBI) VII di Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Udayana, tanggal 27—28 Februari 2014. Ide makalah ini berawal dari diskusi dengan Maryanto, M.Hum., staf teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang terlibat dalam penyusunan buku Bahasa Indonesia untuk SMA/SMK berdasarkan Kurikulum 2013.

## PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan meskipun pada saat ini masih bertahap dan diharapkan tuntas mulai tahun pelajaran 2015. Ketuntasan yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan hanya dari aspek tenaga pendidik (guru) selaku “aktor utama” pembelajaran dalam mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013, kepala/pengawas sekolah, dan manajemen sekolah, melainkan juga penyediaan buku siswa dan guru dari SD/MI kelas 1—6, SMP/MTs kelas 7—9, hingga SMA/MA/SMK/MAK kelas 10—12. Karena pada tahun ini (2013/2014) merupakan tahun pertama diterapkannya Kurikulum 2013, buku siswa dan guru yang sudah tersedia adalah untuk SD/MI kelas 1 dan kelas 4, SMP/MTs kelas 7, dan SMA/MA/SMK/MAK kelas 10.

Pada awal digulirkannya wacana penerapan Kurikulum 2013 tersebut para guru bahasa dan sastra daerah (dan calon guru bahasa dan sastra daerah dari beberapa perguruan tinggi yang membuka jurusan pendidikan bahasa daerah)—terutama daerah-daerah yang telah memiliki pembelajaran bahasa dan sastra daerah sebagai muatan lokalnya, misalnya Bali, Jawa, dan Sunda—sempat dibuat resah. Mereka pun sempat melakukan demonstrasi karena menganggap pelajaran Seni Budaya akan mendepak pembelajaran bahasa dan sastra daerah sebagai muatan lokal pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Pemerintah—dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—bertindak sangat bijaksana dengan membuat kebijakan, yakni memberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk memasukkan materi bahasa dan sastra daerah dalam pelajaran Seni Budaya.

Ada banyak alasan yang dikemukakan terkait kegagalan pengajaran sastra di

sekolah, di antaranya, kurang tersedianya buku-buku sastra yang sesuai dengan latar belakang sosial-budaya pelajar dan minimnya guru bahasa yang benar-benar memiliki minat dan kesungguhan dalam menyajikan materi ajar sastra dengan baik. Pengajaran sastra di sekolah hingga saat ini belum mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Guru hanya mengajarkan pengetahuan dasar sastra seperti definisi dan sejarah kesastraan Indonesia. Padahal tujuan pembelajaran sastra, bukan hanya menanamkan pengetahuan serta peningkatan apresiasi saja, melainkan keterampilan sikap dan nilai budi pekerti pada anak didik.

Dalam makalah singkat ini penulis tidak membahas muatan lokal bahasa dan sastra daerah sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri. Akan tetapi, penulis akan mencoba untuk menawarkan upaya pemertahanan bahasa dan sastra daerah melalui cara lain, yakni dengan menerjemahkan buku siswa SD/MI kelas 1 ke dalam bahasa daerah. Mengapa yang diterjemahkan hanya buku siswa kelas 1? Hal itu disebabkan oleh Kurikulum 2013 baru dilaksanakan untuk kelas 1. Dengan demikian, baru buku kelas 1 itulah yang ada. Untuk dua tahun ke depan, diharapkan buku kelas 2 dan kelas 3 dapat dilakukan penerjemahan.

Dalam Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, khususnya di dalam Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia, baik kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3 selalu dinyatakan, antara lain, tentang pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 33 ayat (2) dinyatakan bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

Pemanfaatan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk membantu pemahaman dan penyajian terhadap pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Hal itu mengingat peserta didik pada awal pendidikan (kelas 1, 2, dan 3) masih berada dalam tahap transisi pemerolehan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, bahasa daerah sebagai bahasa ibu peserta didik—terutama peserta didik yang bertempat tinggal di pedesaan—masih sangat dominan digunakan dalam lingkup keluarga dan lingkungan. Oleh karena itu, sangat tepat dan bijaksana apabila dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah—sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (1)—wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk memberikan layanan dan kemudahan pendidikan serta menghindari diskriminasi itulah anak-anak di suatu daerah tertentu yang masih belum mahir berbahasa Indonesia tidak harus “dipaksa” memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Jika dipaksakan dan siswa tidak terlalu mahir memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, bagaimana siswa bisa memahami materi/isi/substansinya? Jika itu yang terjadi, akan berakibat pada tidak tercapainya secara maksimal standar kompetensi lulusan (SKL) yang dipersyaratkan.

## PEMBAHASAN

### 1. Sekilas Buku Siswa: Pembelajaran Tematik-Terpadu SD/MI Kelas I

*Buku Siswa* merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan siswa terlibat aktif dalam

pembelajaran. Buku siswa dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi dan penggunaan sebagaimana dituangkan dalam *Buku Panduan Guru*.

Kegiatan pembelajaran yang ada di buku siswa lebih merupakan *contoh kegiatan* yang dapat dipilih guru dalam melaksanakan pembelajaran. Guru diharapkan mampu mengembangkan ide-ide kreatif lebih lanjut dengan memanfaatkan alternatif-alternatif kegiatan yang ditawarkan di dalam *Buku Panduan Guru*, atau mengembangkan ide-ide pembelajaran sendiri. Pada semester I terdapat 4 tema. Setiap tema terdiri atas 4 subtema. Tiap subtema diuraikan ke dalam 6 pembelajaran. Satu pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Penjelasan lebih rinci tentang aktivitas pembelajaran dituangkan pada *Buku Panduan Guru*. Adapun subjudul dalam *Buku Siswa* tersebut adalah sebagai berikut: *Ayo Belajar, Ayo Amati, Ayo Berlatih, Ayo Berkreasi, Ayo Mendengarkan, Ayo Bercerita, Ayo Menulis, Ayo Diskusikan, Ayo Menyanyi, Ayo Lakukan, Ayo Berhitung, Ayo Bermain Peran, Ayo Menggambar, Ayo Kerjakan, Ayo Bekerja Sama, Ayo Berlatih, Ayo Renungkan, dan Belajar di Rumah*.

Jika dicermati, struktur penulisan buku tersebut bersifat serba-mencakup (*self contained*). Hal ini dimaksudkan agar buku tersebut dapat digunakan juga oleh orang tua siswa secara mandiri untuk mendukung aktivitas belajar siswa di rumah. Di setiap akhir pembelajaran terdapat kolom untuk orang tua dengan subjudul *Belajar di Rumah*. Kolom ini berisi aktivitas belajar yang dapat dilakukan oleh orang tua bersama dengan anak/siswa. Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat aktif dalam aktivitas belajar siswa. Kecuali sangat sedikit teks pelajaran membaca yang merupakan konsumsi siswa, wacana-wacana yang ada di dalam buku siswa diperuntukkan bagi guru, bukan siswa. Meskipun demikian,

mengingat siswa akan terpapar dengan teks-teks itu, khusus untuk buku kelas 1 penggunaan tanda baca hanya pada yang bersifat dasar dan seperlunya saja, seperti penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, penulisan nama, dan penggunaan tanda titik (.) dan tanda tanya (?). Namun, yang harus dipastikan adalah bahwa tanda-tanda baca tersebut belum diajarkan kepada siswa.

## 2. Manfaat Penerjemahan Buku Tematik Terpadu

Sebagai langkah awal dalam memanfaatkan bahasa daerah sebagai pengantar pendidikan, buku *Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas I* yang menggunakan bahasa Indonesia—terdiri atas empat tema—yang disusun oleh Tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu diterjemahkan ke dalam berbagai versi bahasa daerah sasaran. Penerjemahan tersebut telah coba kami lakukan dengan mengambil bahasa daerah sasaran bahasa Kutai—salah satu bahasa daerah yang dominan digunakan di Provinsi Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kota Samarinda, dan Kota Bontang—yang diketuai oleh Masfufah (2013). Mengapa harus menerjemahkan atau membuat versi dari buku tersebut? Hal itu disebabkan oleh buku yang disusun dan dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut merupakan “buku resmi” Kurikulum 2013 yang sudah dikaji dan diperhitungkan secara cermat sehingga sangat sesuai dengan pola pikir Kurikulum 2013. Buku yang merupakan salah satu instrumen penting dalam Kurikulum 2013 itu menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh (2013), dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi dalam rangka

menuju generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045.

Sesuai dengan hal itu, pembelajaran dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah yang didasarkan atas buku berbahasa Indonesia tidak menyimpang dan tidak mengurangi esensi dan substansi Kurikulum 2013. Dengan adanya terjemahan buku tersebut, beberapa hal yang dapat dicatat sebagai manfaatnya, antara lain, adalah sebagai berikut.

*Pertama*, orang tua yang kurang mahir berbahasa Indonesia dapat lebih mudah dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya ketika mempelajari buku tersebut karena demikianlah tuntutan di dalam Kurikulum 2013. Seperti telah saya kemukakan di depan, pada setiap akhir pembelajaran terdapat kolom untuk orang tua dengan subjudul *Belajar di Rumah* yang berisi aktivitas belajar siswa bersama orang tua bersama anak.

*Kedua*, selain lebih mudah untuk memahami substansi pelajaran, siswa dapat mulai belajar bahasa Indonesia secara bertahap dari bahasa daerah yang dipahaminya. Di samping itu, siswa juga dididik untuk tetap memiliki kecintaan terhadap bahasa daerahnya ketika mulai belajar bahasa nasional, bahasa Negara, bahasa Indonesia, apalagi nantinya mempelajari bahasa asing. Dengan demikian, siswa pada usia kelas awal telah memiliki landasan kuat terhadap bahasa dan sastra daerahnya. Khusus terkait dengan aspek kesastraannya, siswa di daerah tersebut dapat lebih mengenal beberapa jenis sastra di daerahnya, misalnya dongeng, peribahasa, nyanyian rakyat, dan cerita rakyat lainnya sehingga mereka tidak tercabut dan tercerabut dari kearifan lokalnya.

*Ketiga*, khusus bagi guru pendatang (termasuk yang mengikuti program SM3T yang berasal dari berbagai daerah) yang kurang memahami bahasa dan sastra daerah tertentu juga bisa belajar atau mempertajam

kemampuan berbahasa daerahnya dan menggali berbagai cerita rakyat di daerah tersebut. Dengan cara seperti itu dia akan lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa dan orang tua/wali siswa, termasuk dengan warga sekitar tempat dia tinggal. Kompetensi di bidang sosial tersebut mutlak dimiliki oleh seorang guru yang profesional.

*Keempat*, daya hidup (vitalitas) bahasa dan sastra daerah akan tetap dapat dipertahankan. Hal itu disebabkan oleh bahasa daerah tersebut, termasuk aspek kesastraannya, masih dipahami dan digunakan secara aktif oleh generasi muda (anak-anak) melalui jalur pendidikan. Bukankah salah satu indikasi bahasa yang sangat terancam (*seriously endangered languages*) untuk punah adalah bahasa dengan jumlah penutur yang masih banyak, tetapi anak-anak mereka sudah tidak menggunakan bahasa tersebut? Kecintaan anak-anak terhadap bahasa dan sastra daerahnya yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah dapat memberikan andil yang signifikan dalam menjaga agar bahasa daerah tersebut tidak mengalami kepunahan. Bahkan, kalau dilanjutkan dengan adanya muatan lokal bahasa daerah untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA (seperti yang disinggung dalam awal makalah ini), bahasa daerah tertentu bukan hanya terhindar dari kepunahan, melainkan juga dapat ditumbuhkembangkan (revitalisasi) sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.

*Kelima*, terkait dengan upaya perlindungan terhadap bahasa daerah yang didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, negara (melalui jalur pendidikan) memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing (Sugiyono, 2012).

*Keenam*, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas menjadi bukti bahwa sesungguhnya Indonesia sudah sejak tahun 1950 (berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) telah menerapkan prinsip EFA (*education for all*) yang dicetuskan oleh Unesco baru pada tahun 1990-an. Hal itu sekaligus juga menjadi bukti bahwa Indonesia juga telah menerapkan program MLE (*multilingual education*), yaitu program pendidikan yang memanfaatkan bahasa pertama sebagai bahasa pengantar di peringkat awal untuk kemudian suatu saat—umumnya pada kelas IV—beralih ke bahasa nasional. Program MLE itu baru dikenalkan oleh Unesco pada tahun 2000-an (Sugiyono, 2012).

Selain beberapa catatan tersebut, catatan lain terkait dengan pentingnya penerjemahan ke dalam bahasa daerah adalah terdapat kosakata dalam buku berbahasa Indonesia yang di dalam bahasa daerah tertentu merupakan kata tabu. Misalnya, pada buku tema 1: *Diriku* halaman 1 terdapat bentukan kata “membutuhkan” (dalam kalimat *Kita membutuhkan teman*). Padahal, dalam bahasa Banjar dan bahasa Kutai (dua bahasa daerah yang dominan digunakan di Provinsi Kalimantan Timur), makna kata “butuh” adalah kemaluan pria; zakar (Darma, 2013:84). Contoh lain, pada halaman yang sama, penggunaan kata “kita” dalam buku tersebut dimaksudkan sebagai pronomina persona pertama jamak (melibatkan orang pertama/pembicara dan orang kedua/lawan bicara). Dalam bahasa Kutai, kata “kita” bermakna kata ganti orang kedua tunggal ataupun jamak (“kamu” ataupun “kalian”) (Darma, 2013:220). Dengan demikian, siswa akan memiliki persepsi yang salah terhadap penggunaan kata “kita” yang dianggapnya si

“aku” tidak terlibat di dalamnya (karena dimaknai “kamu” atau “kalian”). Hal ini akan menjadi fatal karena salah satu yang diharapkan dari pembelajaran tersebut adalah agar setiap anak didik terlibat di dalamnya (menjadi bagian dari contoh-contoh kalimat) sehingga terbentuklah sikap spiritual dan sikap sosial.

### 3. Kendala Penerjemahan

Terdapat beberapa kendala, baik teknis maupun nonteknis, dalam upaya penerjemahan buku bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah.

*Pertama*, bahasa daerah dengan jumlah penutur sedikit (tergolong ke dalam bahasa hampir punah). Hasil kajian yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 terhadap bahasa Punan Merah di Desa Long Merah, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat, menunjukkan bahwa penutur bahasa tersebut hanya tinggal 244 orang dari jumlah penduduk 485. Apakah bahasa dengan penutur yang sangat terbatas ini akan dibiarkan saja sehingga dalam satu generasi saja bahasa (dan kesastraannya) akan lenyap seiring dengan lenyapnya penutur bahasa daerah tersebut?

*Kedua*, dalam satu daerah terdapat beberapa dialek. Untuk kasus seperti ini diperlukan “kerja ilmiah” terlebih dahulu dengan menentukan bahasa standar yang digunakan dalam wilayah/daerah tersebut. Bahasa standar itulah yang digunakan untuk menerjemahkan.

*Ketiga*, pelaksana (penerjemah) dan otoritas pemegang kebijakan di daerah. Mengingat penerjemahan bukanlah sekadar mengalihkan bahasa satu ke bahasa lain, diperlukan ahli penerjemah yang mumpuni yang memahami bahasa sumber sekaligus bahasa sasaran. Selain itu, agar tidak menyimpang dari substansi yang telah digariskan oleh Kemendikbud, buku *Tematik*

*Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas I* perlu diterjemahkan oleh pakar bahasa daerah yang bersangkutan, yang dapat melibatkan balai/kantor bahasa, perguruan tinggi, budayawan, guru, birokrat pendidikan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Khusus yang terkait dengan aspek kesastraannya, tentu saja materinya tidak perlu diterjemahkan, tetapi justru perlu diganti dengan sastra lokal dari daerah tersebut.

*Keempat*, dana/anggaran yang diperlukan dalam “proyek” tersebut cukup besar. Untuk itu, peran pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan dukungan kebijakan dan finansial.

### PENUTUP

Kedua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia pendidikan, yaitu Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan keleluasaan terhadap penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar pendidikan di kelas awal. Penyusunan buku teks ke dalam bahasa daerah itu sesungguhnya merupakan pendamping atau pelengkap dari buku teks berbahasa Indonesia yang telah dicetak dan dibagikan secara gratis oleh Pemerintah. Tentu saja pelaksanaan atau implementasi di lapangan terkait dengan pemanfaatan “buku teks terjemahan” tersebut sangat bergantung pada kemampuan individual masing-masing guru dalam menguasai bahasa daerah yang bersangkutan, termasuk sastra daerahnya. Penerjemahan sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia yang berlangsung secara normatif atau sesuai dengan kaidah penerjemahan yang ada dapat membantu

dalam proses apresiasi dan pembelajarannya di sekolah. Berbagai strategi penerjemahan yang telah dikuasai penerjemah sangat berperan dalam kualitas terjemahan karya sastra daerah. Dan, apapun strategi yang digunakan penerjemah dalam proses penerjemahan pasti akan mengedepankan teralihkannya tema dan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks sumber. Artinya, kegiatan penerjemahan sastra sangat memberikan kontribusi positif bagi khasanah sastra Indonesia. Lain ceritanya apabila sastra daerah tersebut tidak dialihkan.

Pada akhirnya, penerjemahan atau penyusunan versi bahasa daerah tersebut perlu diverifikasi dan didukung penganggaran dan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darma, M. Erwin dkk. 2013. *Kamus Bahasa Kutai—Bahasa Indonesia*. Samarinda: Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur.
- Depdiknas. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Depdiknas.
- Kemendikbud. 2013. *Diriku: Tema 1 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2013. *Kegemaranku: Tema 2 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2013. *Kegiatanku: Tema 3 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2013. *Keluargaku: Tema 4 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI*. Jakarta: Kemendikbud.
- Masfufah, Nurul. 2013. "Penyusunan Bahan Ajar Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas 1 Versi Bahasa Kutai". Laporan Penelitian. Samarinda: Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur.
- Nuh, Mohammad. 2013. "Pengembangan Kurikulum 2013". Arahannya Mendikbud dalam Penyegaran Narasumber Pelatihan Guru untuk Implementasi Kurikulum 2013, Jakarta, 26—28 Juni 2013.
- Sugiyono. 2012. "Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan". Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kebahasaan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Oktober 2012.